

Hambatan Pelaksanaan Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SDN 169 Arma Jaya Kab. Bengkulu Utara

Ihda Al Husnayaini

SDN 006 Bengkulu Utara

Ihdaalhusnayaini445@gmail.com

Abstrak: Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif responden dalam penelitian ini adalah 1 (satu) orang guru Pendidikan Agama Islam dan satu orang kepala sekolah di SDN 169 Arma Jaya Kab. Bengkulu Utara. penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data yang meliputi: wawancara, obeservasi, dan dokumentasi, dengan demikian dapat dipahami hambatan pelaksanaan kurikulum 2013 pada mata pelajaran pendidikan agama islam di SDN 169 Arma Jaya Kab. Bengkulu Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang di peroleh langsung dari informan penelitian. Hasil penelitian ini adalah hambatan pelaksanaan kurikulum 2013 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN 169 Arma Jaya Kab. Bengkulu Utara meliputi tiga bagian yang harus ditinjau: 1) pengembangan: Pengembangan kurikulum di sekolah ini sudah terlaksana di kelas 1,2,4,5, Visi dan misi di sekolah ini terdapat perbedaan sehingga tidak saling berhubungan dengan kurikulum 2013. 2) pelaksanaan: Sudah terlaksana namun kurang kondusif, Belum efisien karena kondisi lingkungan di pedesaan, Belum tercukupi karena belum ada perpustakaan dan laboratorium Belum tercukupi, Kesulitan akses dan pemahaman peserta didik masih kurang tentang kurikulum 2013, Media dan kondisi lingkungan yang menjadi penghambatnya, dan 3) evaluasi: evaluasi ketika pelaksanaan kurikulum 2013 nya dengan hapalan dan ulangan agar mengetahui kemampuan siswa dalam hambatan pelaksanaan kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 169 Arma Jaya Kab. Bengkulu Utara.

Kata Kunci: Kurikulum 2013, Masalah Kurikulum, Pendidikan Agama Islam

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 pasal 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹

Pengertian pendidikan disini menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya tercipta sebuah wadah dimana peserta didik secara aktif mempertajam dan memunculkan ke permukaan potensi-potensinya sehingga menjadi kemampuan-kemampuan yang dimilikinya secara alamiah. Definisi ini juga memungkinkan sebuah keyakinan bahwa manusia secara alamiah memiliki dimensi jasad, kejiwaan, dan spiritualitas. Di samping itu, definisi yang sama memberikan ruang untuk berasumsi bahwa manusia memiliki peluang untuk bersifat mandiri, aktif, rasional, sosial, dan spritual.

Tujuan pendidikan yang telah dirumuskan berdasarkan landasan pancasila dan UUD 1945 pada dasarnya adalah manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya yang dimaksudkan di sini adalah pertama, manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa. Kedua, berbudi pekerti luhur. ketiga, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Keempat, sehat jasmani dan rohani. Kelima, berkpribadian mantap dan mandiri. Dan keenam, memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

¹UU RI NO.20 TH.2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 3

Kurikulum merupakan salah satu bagian penting terjadinya suatu proses pendidikan. karena suatu pendidikan tanpa adanya kurikulum akan kelihatan amburadul dan tidak teratur. Hal ini akan menimbulkan perubahan dalam perkembangan kurikulum, khususnya di Indonesia. Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, dan sekaligus digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar pada berbagai jenis dan tingkat sekolah.

Sejak isu reformasi pendidikan digulirkan, maka banyak bermunculan gagasan-gagasan pembaruan pendidikan. Reformasi sebagai sebuah gerakan yang memiliki perspektif sejarah politik monumental, karena era reformasi menjadi menjadi era pemerintahan substitusi pemerintahan orde baru. Tentunya gagasan reformasi pendidikan ini memiliki momentum yang amat mendasar dan berbeda dengan gagasan yang sama pada era sebelumnya.

Arah reformasi dalam mewujudkan pengembangan pendidikan terkait dengan kebijakan kurikulum adalah ikut diperbaharainya kurikulum yang ada sebelumnya dari kurikulum 1994 diperbaharui menjadi kurikulum 2004 atau KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Selang dua tahun kemudian KBK pun telah mengalami pembaharuan kembali menjadi KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) atau Kurikulum 2006, hingga kurikulum 2013.

Sejak zaman kemerdekaan, telah terjadi beberapa kali perubahan (penyempurnaan) kurikulum, yang sampai saat ini sekurang-kurangnya sudah terjadi 11 kali, yakni 8 kali terjadi sebelum era otonomi daerah dan 3 kali terjadi setelah era otonomi daerah, yaitu; (1) kurikulum 1947; (2) kurikulum 1964; (3) kurikulum 1968; (4) kurikulum 1973 (proyek printis sekolah pembangunan); (5) kurikulum 1975; (6) kurikulum 1984; (7) kurikulum 1994; (8) kurikulum SMK 1999 (kurikulum 1994 yang disempurnakan) (9) kurikulum 2004 (kurikulum berbasis kompetensi); (10) kurikulum 2006 (kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berbasis kompetensi); (11) kurikulum 2013 (kurikulum yang menekankan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara holistik, berbasis kompetensi).²

Sebelum era otonomi daerah, sesuai dengan sistem pengelolaan pemerintah pada saat itu yang sifatnya sentralistik, pengelolaan pendidikan juga bersifat sentralistik sehingga kurikulumnya juga bersifat sentralistik. Kurikulum yang sentralistik, ditetapkan oleh pemerintah pusat, sekolah tinggal mengimplementasikan saja. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dan Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, terjadi perubahan sistem pengelolaan pemerintahan, yakni yang semula bersifat sentralistik diubah menjadi desentralistik. Pengelolaan pendidikan juga desentralistik sehingga pengembangan kurikulumnya seharusnya juga berubah bersifat desentralistik. Kurikulum yang desentralistik, yakni sekolah diberi kewenangan untuk mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kondisi sekolahnya masing-masing, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Seorang individu hanyalah individu ketika secara simultan menyadari individualitasnya yang unik dan kebersamaannya dengan individu lain yang ada disekitarnya. seorang individu tidak memiliki arti apa-apa dalam keadaan terisolasi, sebab dalam keadaan itu dia tidak lagi menjadi individu melainkan segala sesuatu. Dengan demikian, manusia beradab adalah individu yang sadar akan individualitasnya dan sadar akan hubungannya yang tepat dengan diri, tuhan, masyarakat, dan alam yang tampak maupun yang ghaib itulah sebabnya, dalam pandangan islam, manusia yang baik atau individu yang baik bagi anak-anaknya, suami yang baik bagi istrinya, anak yang baik bagi orang tuanya, tetangga yang baik, dan warga yang baik bagi negaranya. Dengan kata lain ia harus mengetahui kedudukan dirinya di tengah-tengah berbagai tingkatan manusia, yang harus dipahami sebagai sesuatu yang telah disusun secara hierarkis dan logis ke dalam tingkatan-tingkatan

²Herry Widyastono, (*pengembangan kurikulum di era otonomi daerah*), h. 54

(derajat) kebaikan yang berdasarkan kriteria al quran mengenai kecerdasan, keilmuwan, dan kebaikan (ihsan), dan harus berbuat selaras dengan ilmu pengetahuan itu secara positif, terpercaya dan terpuji.

Peneliti melakukan wawancara tentang hambatan pelaksanaan kurikulum 2013 di SDN 169 Arma Jaya kab. Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. Berdasarkan hasil wawancara tersebut adapun hambatan pelaksanaan kurikulum di SDN 169 adalah pemahaman guru tentang kurikulum masih minim, terbatasnya sarana yang diberikan guru seperti buku kurikulumnya sendiri masih belum dimiliki oleh setiap guru dan terbatasnya fasilitas belajar, lemahnya kegiatan pemantauan, manajemen yang belum efektif dan efisien, dan proses sosialisasi terhadap kurikulum baru belum mengenai sasaran. Kemudian sekolah ini masih menggunakan kurikulum ktsp sedangkan perbelakuan kurikulum 2013 bisa dimulai dari sekarang Permendikbud Nomor 160/2014 mewajibkan pemberlakuan kurikulum 2013 paling lama tahun ajaran 2019/2020.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari salah satu guru pendidikan agama islam bahwa perencanaan di sekolah ini sudah baik terdapat rpp, silabus, prota dan promes dalam proses administrasi pembelajaran sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku. Namun pada pelaksanaan dilapangan sekolah ini bisa menerapkan kurikulum 2013 namun terdapat kendala dalam fasilitas dan sarana-prasarana dalam menunjang proses belajar mengajar pembelajaran pendidikan agama islam. Selanjutnya evaluasi kurikulum di sekolah ini sudah bisa dilakukan dengan menggunakan kurikulum 2013 namun pemantauan yang kurang dari lembaga yang berwenang.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Hambatan Pelaksanaan Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sdn 169 Arma Jaya Kab. Bengkulu Utara”, Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU No. 20 Tahun 2003 Tentang SPN)

Kurikulum 2013 menekankan pengembangan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik secara holistik (seimbang). Kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap ditagih dalam rapor dan merupakan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik. Kompetensi pengetahuan yang dikembangkan meliputi mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi agar menjadi pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Kompetensi keterampilan peserta didik yang dikembangkan meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta agar menjadi pribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah konret dan abstrak. Kompetensi sikap peserta didik yang dikembangkan meliputi menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan sehingga menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya (Kemdikbud, 2013f).

Kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, pertama kali dikemukakan oleh Bloom (1965) dan sudah menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum di indonesia sejak Kurikulum 1973 (Kurikulum PPSP). Akan tetapi, dalam implementasinya guru-guru pada umumnya tidak mengembangkan kompetensi keterampilan dan sikap secara eksplisit, mungkin karena tidak ditagih dalam rapor sehingga tidak merupakan penentu kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik.

Pada Kurikulum 2013, ketiga kompetensi tersebut ditagih dalam rapor dan merupakan penentu kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik sehingga guru wajib mengimplementasikannya dalam pembelajaran dan penilaian. a) Masih sering terjadi perbedaan persepsi visi dan misi yang

hendak dicapai oleh setiap institusi pendidikan baik dijenjang dasar maupun dijenjang sekolah menengah, b) Lahirnya gagasan desentralisasi dalam pengembangan kurikulum sebagai akibat desentralisasi pendidikan tidak disertai dengan acuan buku yang jelas, dalam arti apakah lingkup pemeberlakuan berada pada tingkat I, didaerah tingkat II, ataukah pada lingkup wilayah sekolah. Pada saat ini adanya perubahan dalam sistem pemerintahan dinegara kita dari sentralisai ke desentralisasi mengakibatkan Departemen Pendidikan yang bertanggung jawab dalam perkembangan dalam pengembangan pendidikan termasuk didalamnya pengembangan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, monitoring, dan evaluasi, yang ada pada masa sebelumnya mempunyai garis vertikal kebawah dari menteri sampai pada kepala kantor kecamatan yang membawahi kepala sekolah, guru-guru mempunyai aturan standar mengikuti juknis dan juklak dari atas. Saat ini Departemen hanya berada dipusat sementara didaerah mengalami perubahan menyatu dengan kantor dinas dibawah gubernur untuk provinsi dan bupati untuk tingkat kabupaten, sehingga garis komandonya mungkin jadi teputus-putus atau hanya garis tipis, hal ini mungkin akan menjadi hambatan penyeragam dalam pengembangan/pelaksanaan kurikulum, monitoring, dan evaluasi. Walau sisi positifnya daerah bisa lebih mandiri untuk mengembangkan kurikulumnya disesuaikan dengan potensi daerah, tetapi hambatan untuk saat ini untuk pengembangan kurikulum, monitoring dan evaluasi, daerah kurang memiliki pengalaman dalam pembuatannya juga kurang SDM yang ada didaerah, c) Tim perekayasa kurikulum hingga saat ini masih terpusat ditingkat pusat, sementara ditingkat II maupun pada wilayah/sekolah belum tersedia sehingga sulit melakukan pengembangan yang berkesinambungan terhadap kurikulum yang ada, d) Pengembangan kurikulum saat ini belum berorientasi pada kepentingan peserta didik atau peserta didik sebagai subjek (*child oriented*), tetapi kurikulum dikembangkan kearah peserta didik sebagai objek. Hal ini mengakibatkan kurikulum dikembangkan sedemikian rupa agar anak didik menguasai sejumlah pengetahuan, kemampuan, keterampilan; bukan dikembangkan untuk memberi kesempatan anak didik mengembangkan kepribadian dan kemampuan yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kepentingan hidup (fisik, moral, dan mental) dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat.

Pengembangan kurikulum saat ini belum mengacu kepada kepentingan daerah, nasional, dan juga yang diperlukan untuk melakukan mobalitas horizontal seseorang, Kurangnya kesempatan dan keterlibatan guru secara langsung dalam pengembangan kurikulum, Pemahaman guru tentang kurikulum masih minim. Kesempatan bagi guru dalam mengembangkan pemahaman dan kemampuan dalam memahami dan menafsirkan suatu kurikulum masih kurang baik isi maupun tujuan secara utuh dan menyeluruh, Terbatasnya sarana yang diberikan pada guru seperti buku kurikulumnya sendiri masih belum dimiliki oleh setiap guru dan terbatasnya faisalitas belajar.

Pengembangan kurikulum, Bersifat sentralistik dan kurang memberdayakan peran sekolah dan partisipasi masyarakat, Belum adanya lembaga yang berperan sebagai media akuntabilisasi pendidikan, Pengembangan kurikulum seringkali tidak dilandasi oleh filsafat pendidikan yang memberikan ide dasar dalam mewujudkan tujuan pendidikan, Pengembangan kurikulum lebih mengarah pada kepentingan politis dan keinginan admisnistrator tingkat pusat, Pengembangan kurikulum kurang memperhatikan kesinambungan proses belajar dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, Ketersediaan dokumen kurikulum yang memadai dan dapat dimiliki oleh setiap guru-guru. Guru-guru tidak memiliki dokumen kurikulum yang lengkap/memadai, Pola monitoring yang berkembang cenderung pada pendekatan inspeksi, bukan pada pembinaan professional, Evaluasi masih bersifat formalitas, belum mengukur secara utuh dan perlu dicarikan instrumen evaluasi yang yang handal.

Masalah dalam pengembangan kurikulum; pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam kurikulum lainnya, adalah: a) Kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah, b) Sumber daya manusia masih rendah dedikasinya terhadap pelaksanaan tugasnya, c) Beban belajar anak didik, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terlalu berat, kurang aplikatif, d)

Pengembangan kurikulum kurang memeberikan bekal kepada siswa yang tidak melanjutkan ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi khususnya utuk SLTP Dan SMU.

Pelaksanaan; pemerintah setengah hati dalam memfasilitasi peningkatan kualitas pendidikan khususnya dengan pemberdayaan perpustakaan sekolah terutama perpustakaan sekolah dasar dan SLTP, Monitoring; lemahnya kegiatan pemantauan pendidikan, Evaluasi; pelaksanaan evaluasi akhir untuk SMU dan SMK, untuk SD dan SLTP perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Tidak tersedia dana untuk pengelolaan dan tindak lanjut pelaksanaan evaluasi/ulangan umum.

Strategi pembelajaran pada umumnya mengacu pada penguasaan informasi dan pengetahuan yang tidak relevan dengan tercapainya institusional yang telah dicangkan, Pelaksanaan kurikulum dilapangan sering tidak dapat terlaksana optimal karena sarana prasarana penunjang sangat minim dan juga kualitas SDM kurang kreatif dan inovatif, Pelaksanaan kurikulum dalam aktivitas disekolah masih sebatas pada sosialisasi nilai dengan pola hafalan terhadap materi yang ada pada kurikulum, Pembelajaran dikelas cenderung pengkotakan bidang studi yang ketat dan hanya memfokuskan pada perolehan NEM tertinggi.

Dominasi pengajaran tatap muka, kurangnya kegiatan aktif siswa sehingga sisiwa lebih banyak mendengar, terlalu menekankan pengetahuan ringan dan rumus-rumus dengan mengabaikan keterampilan dan pemahaman konsep-konsep yang diperlukan untuk kehidupan siswa yang akan dating, Proses sosialisasi terhadap kurikulum baru belum mengenai sasaran (guru, personel sekolah, siswa, orangtua siswa, masyarakat pemakai tamatan dll), Guru dan personel sekolah sulit mengubah pola pikir lama ke pola pikir baru sesuai dengan pengembangan yang terjadi dalam kurikulum, Tidak semua aparat yang ada dilapangan “*well come*” terhdap kurikulum baru, bahkan ada yang menerima dengan sikap apatis.

Kegiatan monitoring dilapangan oleh pejabat yang berwenang hanya sebatas mengamati, seringkali dalam pengamatan tersebut tidak disertai rencana yang jelas sehingga dalam kegiatannya tanpa instrumen untuk dapat menjaring informasi yang penting dan diperlukan, Pemahaman terhadap konsep evaluasi kurikulum oleh pihak-pihak pelaksanaan pendidikan baik secara mikro maupun makro masih kurang baik, Sistem evaluasi yang dilaksanakan tidak mendukung tercapainya tujuan instruksional yang telah dikembangkan sejak awal, Teknik evaluasi dan pengukuran yang digunakan oleh penyelenggara pendidikan dan yang menjadi garis kebijakan pemerintahan belum komprehensif, Standar evaluasi belum ditetapkan secara jelas dan tegas sehingga kriteria pencapaian yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan maupun daerah dari berbagai wilayah yang luas menjadi heterogen, Praktek pendidikan masih sebatas sosialisasi nilai dengan pola hafalan berdampak pada pengukuran hasil belajar siswa hanya sebatas aspek efektif dan psikomotor untuk internalisasi nilai terabaikan, Evaluasi kurikulum masih belum dipahami sebagai bagian yang penting dalam sistem kurikulum, Masih simpang siurnya pemahaman kurikulum, antara para pelaksana (guru) dengan pihak yang berwenang melakukan monitoring.

Monitoring cenderung bersifat satu arah (administratif), vertikal serta kurang mengembangkan prinsip demokrasi, misalnya dikembangkan secara seimbang, baik vertikal maupun horizontal, Evaluasi dilakukan secara *topdown*, seragam, kurang memperhatikan keragaman dan potensi yang berbeda. Evaluasi masih bersifat parsial, tidak utuh/komprehensif dan tidak berorientasi pada suatu model kerja yang sistematis.³

Dari pengertian kurikulum di atas, dapat diperoleh gambaran, bahwa pendidikan islam sebagai pendidikan yang berdasarkan kepada al-quran dan as-sunah sangat luas jangkauanya. Karena islam mendorong setiap pemeluknya untuk memperoleh pendidikan tanpa kenal batas. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa sebagai inti dari ciri-ciri kurikulum pendidikan islam

³Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) h.4-8

adalah kurikulum yang dapat memotivasi anak didik untuk berakhlak atau berbudi pekerti luhur, baik terhadap tuhan, terhadap diri dan terhadap lingkungan sekitarnya.

Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil tempat di SDN 169 Kab. Bengkulu Utara, sedangkan waktu penelitian ini berlangsung yakni dari tanggal 31 oktober 2018 s.d 11 desember 2018, Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yakni suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang, baik individu maupun secara kelompok.⁴ Penelitian ini peneliti berusaha bagaimana menggambarkan apa yang menjadi hambatan pelaksanaan kurikulum 2013 di SDN 169 Kab. Bengkulu Utara.

Pembahasan

Pengembangan Kurikulum

Sebelum era otonomi daerah, sesuai dengan sistem pengelolaan pemerintah pada saat itu yang sifatnya sentralistik, pengelolaan pendidikan juga bersifat sentralistik sehingga kurikulumnya juga bersifat sentralistik. Kurikulum yang sentralistik, ditetapkan oleh pemerintah pusat, sekolah tinggal mengimplementasikan saja. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dan Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, terjadi perubahan sistem pengelolaan pemerintahan, yakni yang semula bersifat sentralistik diubah menjadi desentralistik. Pengelolaan pendidikan juga desentralistik sehingga pengembangan kurikulumnya seharusnya juga berubah bersifat desentralistik. Kurikulum yang desentralistik, yakni sekolah diberi kewenangan untuk mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kondisi sekolahnya masing-masing, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Pada sekolah ini pengembangan kurikulum 2013 telah terlaksana pada tahun 2017 namun yang menggunakan kurikulum 2013 di sekolah ini hanya terdapat 4 kelas yaitu kelas 1,2,4,5 sedangkan yang masih menggunakan kurikulum ktsp kelas 3,6.

Visi dan Misi

Visi merupakan serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai inti sebuah organisasi, perusahaan atau instansi. Visi juga adalah pikiran-pikiran yang ada di dalam benak para pendiri. Pikiran-pikiran tersebut adalah gambaran tentang masa depan yang ingin di capai. Misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Selain itu, misi juga merupakan deskripsi atau tujuan mengapa perusahaan, organisasi atau instansi tersebut berada di tengah-tengah masyarakat . namun terdapat perbedaan visi dan misi di SDN 169 Arma Jaya Kab. Bengkulu Utara. Perbedaan visi dan misi merupakan bagian dari pengembangan kurikulum di sekolah ini.

Sistem

Mutu lulusan, dipengaruhi oleh mutu kegiatan belajar mengajar, sedangkan mutu kegiatan belajar mengajar ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain input peserta didik, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dana, manajemen, dan lingkungan, yang saling terkait satu sama lain, yang merupakan subsistem dalam sistem pembelajaran⁵

Apabila mutu lulusannya baik, dapat diprediksi bahwa mutu kegiatan belajar mengajarnya juga baik, input siswa, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengolahan data, manajemen dan lingkungannya memadai. Akan tetapi, dari berbagai faktor tersebut, kurikulum mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh proses

⁴ Arikunto, Suharsimi. *“manajemen penelitian”* (Jakarta, Rineka Cipta, 2016), Cet. 13, h. 234

⁵ Herry Widyastono, *Pengembangan Kurikulum Di Era Otonomi Daerah* , (Jakarta: Bumi Aksar, 2013), h. 7-11

pendidikan. Artinya, kurikulum merupakan ciri utama pendidikan di sekolah. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan tertentu. Setiap praktik pendidikan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu, ataupun kemampuan bekerja. Untuk menyampaikan bahan pelajaran, ataupun mengembangkan kemampuan-kemampuan tersebut diperlukan metode penyampaian, serta alat-alat bantu tertentu. Untuk menilai hasil dan proses pendidikan, juga diperlukan cara-cara dan alat-alat penilaian tertentu pula. Hal-hal tersebut, yaitu tujuan, bahan ajar, metode alat, dan penilaian merupakan komponen-komponen utama kurikulum. Dengan berpedoman pada kurikulum, interaksi pendidikan antara guru dan peserta didik berlangsung lebih terarah.

Menurut Johnson (1967) kurikulum *prescribes (or at least anticipates) the result of instruction*. Kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi, serta proses pendidikan. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 angka (9) yang menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kurikulum merupakan inti dari pendidikan, selain berisi rumusan tentang tujuan yang menentukan ke mana peserta didik akan dibawa dan diarahkan, juga berisi rumusan tentang isi dan kegiatan belajar, yang akan membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta nilai-nilai yang mereka perlukan dalam kehidupan dan pelaksanaan tugas pekerja di masa yang akan datang. Kurikulum memberikan dasar-dasar bagiperkembangan kepribadian dan kemampuan profesional, yang akan menentukan kualitas insan dan sumber daya manusia suatu bangsa.

Kedudukan kurikulum dalam pendidikan adalah (1) sebagai *construct* yang dibangun untuk mentransfer apa yang sudah terjadi di masa lalu kepada generasi berikutnya untuk dilestarikan, diteruskan, atau dikembangkan; (2) jawaban untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang berkenaan dengan pendidikan; dan (3) untuk membangun kehidupan masa depan di mana masa lalu, masa sekarang, dan berbagai rencana pengembangan dan pembangunan bangsa dijadikan dasar untuk mengembangkan kehidupan masa depan (Sutarto,dkk., 2013) ; serta (4) sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU No. 20 Tahun 2003). Di sekolah ini walaupun sudah terlaksana nya kurikulum 2013 namun belum sepenuhnya efektif dikarenakan sekolah ini kondisi dan suasana lingkungannya belum mendukung untuk terlaksananya kurikulum 2013.

Fasilitas

Fasilitas erat kaitannya dengan kurikulum 2013. Apabila fasilitas di sekolah tidak memadai mengakibatkan proses belajar mengajar tidak berjalan dengan baik dan lancar. Fasilitas di sekolah ini belum memadai karena masih minim sehingga proses belajar mengajar kurang efektif. Karena saat mereka membutuhkan media yang bisa dilakukan untuk metodologi pembelajaran tidak bisa dilakukan seperti sekolah perkotaan. Untuk kurikulum 2013 terlaksana tapi fasilitasnya yang menjadi kendala dalam sebuah proses belajar mengajar.

Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk memberikan nilai atau pertimbangan sesuai dengan kriteria yang ada untuk mendapatkan hasil evaluasi yang objektif dan meyakinkan. Evaluasi dalam pembelajaran sangat lah penting dilaksanakan pada sekolah ini. Sehingga guru memberikan tugas agar mengetahui seberapa kemampuan dari peserta didik di sekolah ini. Namun untuk akses yang belum menjangkau untuk sekolah ini karena sekolah ini tidak sama dengan sekolah perkotaan sehingga sulit untuk mengakses ke jaringan internet.

Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap, Pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah ini sudah terlaksana namun ada 2 kelas yang belum memakai kurikulum 2013 pada kelas 3 dan 6 karena masih menggunakan KTSP. pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah ini di laksanakan pada tahun 2017 baru setahun ini mereka dahulu masih menggunakan kurikulum ktsp karena pemerintah mewajibkan penggunaan kurikulum 2013 sehingga sekolah ini menggunakan kurikulum 2013.

Sarana dan Prasarana

Dalam mencapai prestasi siswa tidak luput dengan sarana dan prasarana di sekolah. Sarana yang lengkap bisa menunjang siswa untuk lebih kreatif dan bisa meningkatkan prestasi belajar. Berbeda dengan sekolah yang sarana dan prasarana yang kurang mendukung sehingga siswa tidak bisa berkreasi.

Sistem Kurikulum 2013

Sistem kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berlaku dalam dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 (yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan) yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun.

Hambatan Pelaksanaan

Setiap melakukan tindakan ada nama nya kendala-kendala dalam melaksanakan sebuah proses penggunaan kurikulum di sekolah. Karena di dalam pelaksanaan tidak akan jauh dari masalah dan sebuah hambatan.

Persiapan Guru

Dalam melakukan sebuah proses dalam pembelajaran hendaknya guru melakukan persiapan-persiapan dalam melaksanakan sebuah kurikulum dalam pembelajaran sehingga proses belajar mengajar diharapkan dapat berjalan dengan lancar, Dari hasil observasi , lapangan yang telah dilakukan peneliti terhadap kondisi dan realitas yang terjadi, dan hasil wawancara terhadap guru pendidikan agama islam dan kepala sekolah menunjukkan bahwa hambatan pelaksanaan kurikulum 2013 pada mata pelajaran pendidikan agama islam

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di SDN 169 Arma Jaya Kab.Bengkulu Utara, maka dapat ditarik kesimpulannya yakni: Hambatan Pelaksanaan Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 169 Arma Jaya Kab.Bengkulu Utara. a) Perencanaan, Pemahaman guru tentang kurikulum masih minim. Kesempatan bagi guru dalam mengembangkan pemahaman dan kemampuan dalam memahami dan menafsirkan suatu kurikulum masih kurang baik isi maupun tujuan secara utuh dan menyeluruh, Terbatasnya sarana yang diberikan pada guru seperti buku kurikulumnya sendiri masih belum dimiliki oleh setiap guru dan terbatasnya fasilitas belajar, Pelaksanaan kurikulum, b) Pelaksanaan kurikulum dilapangan sering tidak dapat terlaksana optimal karena sarana prasarana penunjang sangat minim dan juga kualitas SDM kurang kreatif dan inovatif, Pelaksanaan kurikulum dalam aktivitas disekolah masih sebatas pada sosialisasi nilai dengan pola hafalan terhadap materi yang ada pada kurikulum, Pembelajaran dikelas cenderung pengkotakan bidang studi yang ketat dan hanya memfokuskan pada perolehan NEM tertinggi, Dominasi pengajaran tatap muka, kurangnya kegiatan aktif siswa sehingga siswa lebih banyak mendengar, terlalu menekankan pengetahuan ringan dan rumus-rumus dengan mengabaikan keterampilan dan pemahaman konsep-konsep yang diperlukan untuk kehidupan siswa yang akan datang, Guru dan personel sekolah sulit

mengubah pola pikir lama ke pola pikir baru sesuai dengan pengembangan yang terjadi dalam kurikulum. c) Evaluasi, Kegiatan monitoring dilapangan oleh pejabat yang berwenang hanya sebatas mengamati, seringkali dalam pengamatan tersebut tidak disertai rencana yang jelas sehingga dalam kegiatannya tanpa instrumen untuk dapat menjangkau informasi yang penting dan diperlukan, Pemahaman terhadap konsep evaluasi kurikulum oleh pihak-pihak pelaksanaan pendidikan baik secara mikro maupun makro masih kurang baik, Sistem evaluasi yang dilaksanakan tidak mendukung tercapainya tujuan instruksional yang telah dikembangkan sejak awal, Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada mata pelajaran pendidikan Agama Islam di SDN 169 Arma Jaya Kab. Bengkulu Utara adalah sebagai berikut: Pertemuan antar sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013, Workshop yang membahas cara mengajarkan kegiatan pembelajaran yang dimaksudkan dalam kurikulum 2013, Tersedianya fasilitas fisik atau fasilitas belajar yang memadai dan menyenangkan, Adanya tenaga penunjang pendidikan, seperti tenaga administrasi, pembimbing, pustakawan, laboran Tersedianya dana yang memadai kepemimpinan pendidikan yang visioner, transparan, dan akuntabel.

Bibliografi

- Abuddin Nata, 2010, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Arikunto, Suharsimi, 2014, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Armai Arief, 2002, *Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam*, Ciputat: Sinar Grafika
- Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia
- Hasbullah, 2008, *Otonomi Pendidikan*, Banjarmasin: Rajawali Pers
- Moleong, lexy j, 2017, *Metodologi penelitian kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosdakarya
- Rusman, 2009, *Manajemen Kurikulum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Umar, Bukhari, 2010, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Amzah
- UU RI NO.20 TH.2003, 2008, *Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika
- Zainal Arifin, 2011, *Konsep Dan Model Pengembangan Kurikulum*, Ciputat: PT remaja rosdakarya

